ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result Periode 2014-2016 GCF Output 2

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2025

Nama Proyek	:	RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	:	Provinsi Kalimantan Selatan
Nama Lemtara	:	Penabulu Foundation
Judul Proposal	:	Penguatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penanganan Lahan Kritis dan Gangguan Kehutanan, serta Penguatan Perhutanan Sosial, Kelembagaan dan Kebijakan REDD+Prov Kalimantan Selatan
Periode pelaporan summary safeguard BPDLH	:	Tahun 2025 (Periode Oktober - Desember 2025)

PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Penabulu Foundation sebagai Lembaga Penyalur Dana (Lemtara) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip safeguard dalam implementasi program. Upaya tersebut mencakup penguatan aspek tata kelola, perlindungan lingkungan, serta inklusi sosial dalam setiap tahapan kegiatan program.

Dari aspek tata kelola dan kelembagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan telah menerbitkan sejumlah dokumen resmi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan, termasuk penunjukan pendamping kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta pembentukan tim penyusun Rancangan Teknis (RTK) RHL. Dokumen-dokumen ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah dan memiliki legitimasi kelembagaan yang jelas. Pada periode pelaporan tahun 2025 juga telah difasilitasi penyusunan Rancangan Teknis RHL seluas 100 hektare di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, yang berada dalam wilayah kelola RHL Kayu Tangi, sebagai bagian dari perencanaan teknis implementasi rehabilitasi lahan.

Dari aspek perlindungan lingkungan, program memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis. Salah satu bentuk kepatuhan safeguard adalah memastikan bahwa pengadaan dan penanaman bibit menggunakan jenis tanaman lokal dan non-invasif, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.

Dari aspek perlindungan sosial dan inklusivitas, program secara konsisten mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam berbagai tahapan implementasi, termasuk rekrutmen tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat. Penabulu Foundation menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi, yang memastikan bahwa perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan program. Selama periode pelaporan, partisipasi pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan program tercatat sebanyak 1.274 peserta, terdiri dari 992 laki-laki (75,96%) dan 282 perempuan (28,43%). Data ini menunjukkan adanya keterlibatan perempuan yang signifikan dalam proses sosialisasi, konsultasi, serta kegiatan teknis program, meskipun peningkatan partisipasi perempuan tetap menjadi perhatian dalam implementasi program ke depan.

Program juga memperkuat standar integritas dan perlindungan sosial melalui komitmen untuk mencegah pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta berbagai bentuk perilaku tidak etis dalam lingkungan kerja program. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan melalui publikasi terbuka terhadap peluang kerja, penerapan proses seleksi yang adil, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPDLH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Kalsel memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan Selatan.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Selatan.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan:

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas	Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalimantan Selatan: **1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II *"Result based payment for verified emission reduction"* yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023** MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA *RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2* UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *"RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION"* DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh *Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016* yang berasal dari *Green Climate Fund* (GCF) sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan *Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II *"Result Based Payment for Verified Emission Reduction"* perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II *"Result Based Payment for Verified Emission Reduction"*; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas - 4 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA *RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2* UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *"RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION"* ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *"RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION"* | No.	Provinsi	"Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)
---	---	---
1	Papua	5.137.209
2	Kalimantan Tengah	5.137.209
3	Kalimantan Timur	4.691.093
4	Sumatera Barat	3.587.043
5	Kalimantan Selatan	3.459.298
6	Sulawesi Tengah	2.808.258
7	Papua Barat	2.663.149
8	Kalimantan Utara	2.660.468
9	Kalimantan Barat	2.506.965
10	Jambi	2.287.204
11	Riau	2.065.102
12	Sumatera Utara	1.750.752
13	Aceh	1.750.396
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414
15	Maluku	1.173.431
16	Maluku Utara	1.131.119
17	Sulawesi Selatan	945.884
18	Sulawesi Barat	812.166
19	Bengkulu	757.256
20	Sumatera Selatan	692.253
21	Jawa Timur	441.058
22	Gorontalo	414.883
23	Sulawesi Utara	402.439
24	Nusa Tenggara Timur	397.159
25	Nusa Tenggara Barat	284.482
26	Bangka Belitung	227.493
27	Lampung	205.488
28	Jawa Tengah	205.488
29	Kepulauan Riau	205.488
30	Jawa Barat	205.488
31	Bali	205.488	 Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II "Result based payment for verified emission reduction" yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 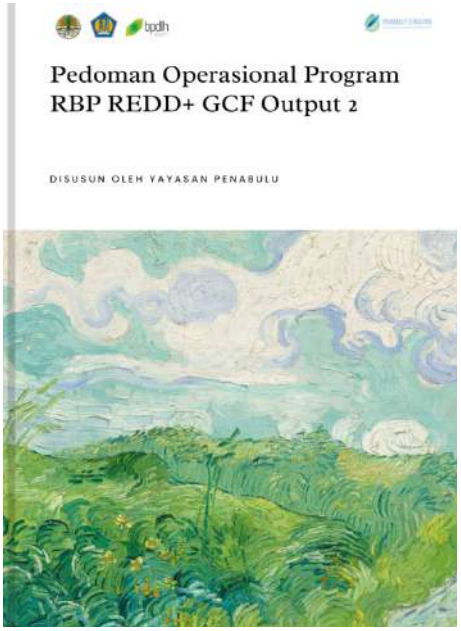 Pedoman Operasional Program RBP REDD+ GCF Output 2 DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU PENABULU ESMS ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM 2021 PENABULU FOUNDATION 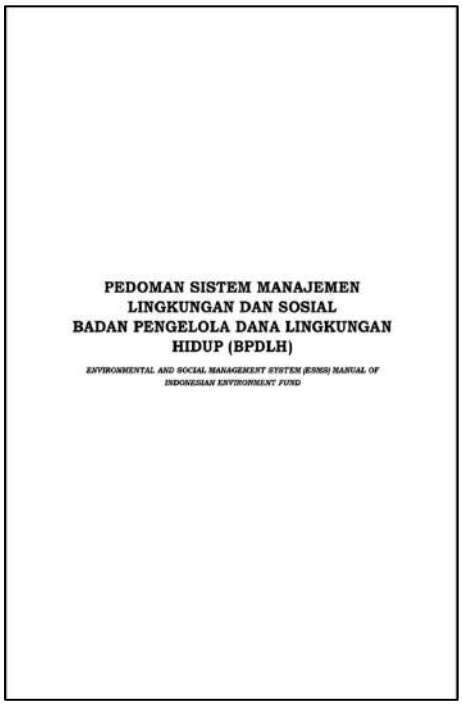 PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH) ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM (ESMS) MANUAL OF INDONESIAN ENVIRONMENT FUND Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program. Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	3. **Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan** *(Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)* PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KEHUTANAN Jl. A.Yani Timur No.14 Telp. (0511) 4774534, 4772234, Fax.(0511)4772234 Website : www.dishutal.kalselprov.go.id / E-mail : dishutalsel01@gmail.com Kotak Pos 1030 BANJARBARU (70713) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBEKALAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT MITRA POLHUT TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KEHUTANAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG Jl. A. Yani Km 9 (Ansh Kalimi) Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Telpon (0526) 2031541 Fax (0526) 2031541 Email : KPHTabalong@kalselprov.go.id Kode Pos 71571 TABALONG Tabalong, 21 November 2025 Nomor : 500.4.6.6/173/KPH-TABALONG/2025 Lampiran : - Perihal : Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Kepada Yth. Kepala Desa Garagata di - Tempat Dengan Hormat, Dalam rangka meningkatkan keterampilan, kesadaran dan tanggung jawab dalam membantu Polisi Kehutanan dalam Pengamanan Hutan, maka akan diadakan kegiatan "Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)". Berkaitan dengan hal tersebut, kami meminta Bapak/Ibu Kepala Desa Garagata untuk mengadirkan perwakilan anggota MMP sebanyak 20 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut pada : Hari/ Tanggal : Kamis s.d Sabtu, 27 s.d 29 November 2025 Waktu : 09.30 Wita - Selesai Tempat : Objek Wisata Liang Tapoh Desa Garagita Kec. Jaro Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. KEPALA KPH TABALONG, Ir. CAHYADI ARIF, ST., MM NIP. 19770814 200312 1 006 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KEHUTANAN SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: 800.1.11.1/1104/KPH-TUT/2025 Dasar : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 2. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 3. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi Kalimantan Selatan MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama : Eko Djatmiko Widodo, SP Pangkat/Golongan : Penata (III/c) NIP : 197206130 200003 1 006 Jabatan : Polisi Kehutanan Ahli Madya Kepada : 2. Nama : Gunawan, SH Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) NIP : 198809220 199003 1 001 Jabatan : Polisi Kehutanan Ahli Muda Untuk : 1. Untuk menjadi Narasumber Dalam Rangka Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Wilayah KPH Tabalong pada tanggal 27 – 29 November 2025 2. Pembebanan Biaya : RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi Kalimantan Selatan 3. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada yang memberikan perintah paling lama 5 hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas. 4. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Banjarbaru, 21 November 2025 Kepala Dinas, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KEHUTANAN SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: 800.1.11.1/1104/KPH-TUT/2025 Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 2. RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi Kalimantan Selatan MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : Agus Supriono, SST Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d) NIP : 198808171998031015 Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Tala 2. Nama : Fathurahman Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) NIP : 198805052020011 006 Jabatan : Staff PHDDAE 3. Nama : Joko Yulianto, A. Md Pangkat/Golongan : Pengatur TK. I (II/d) NIP : 196111222000031017 Jabatan : Polisi Kehutanan Terampil 4. Nama : Muhammad Ishak Pangkat/Golongan : V NIP : 198908429 202421 1 003 Jabatan : Pengendali Biodiversi Hutan Penula 5. Nama : H. Rahmat Adillah Pangkat/Golongan : V NIP : 200106027 202021 1 001 Jabatan : Pengendali Biodiversi Hutan Penula Untuk : 1. Melaksanakan Pelatihan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembekalan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api ke KPH Tanah Laut pada tanggal 28 Oktober 2025 2. Pembebanan Biaya : RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi Kalimantan Selatan 3. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada yang memberikan perintah paling lama 5 hari kerja setelah melaksanakan tugas. 4. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Banjarbaru, 24 Oktober 2025 Kepala Dinas, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KEHUTANAN SURAT PERINTAH TUGAS Dasar : Keputusan Menteri Kehutanan Kepulauan Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/BPDLH/2025 Tentang Penyusunan Dana Dalam Rangka Implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD Pro Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan-5 Melalui Lembaga Pelaksana. MEMERINTAKAN : Kepada : 1. Nama : Gede Arya Gotmak, S. Hut, MP Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) NIP : 197808261999021 008 Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada : 2. Nama : Muslim Hafandi, S.Hut Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) NIP : 197412003 200701 2 014 Jabatan : Kasi Pengelolaan, Kerjasama dan Inovasi Kehutanan Kepada : 3. Nama : Tri Wahyudi, S. Hut Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) NIP : 197412002 200801 2 007 Jabatan : Perencana Bidang RPH Kepada : 4. Nama : Ferdi Ardiansyah Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) NIP : 197708061 998031 1 014 Jabatan : Perencana Bidang RPH Kepada : 5. Nama : Lisa Nurhayati, S. Hut Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) NIP : 197403071 200604 2 016 Jabatan : Kasi Pemanfaatan Hutan KPH Tanah Laut Untuk : 1. Pelaksanaan Dinas dalam rangka Dak Lokasi Pengembangan Sphongkara di wilayah kerja KPH Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 – 19 November 2025 2. Pembebanan Biaya : RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada yang memberikan perintah paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas. 4. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Banjarbaru, 14 November 2025 Kepala Dinas, ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang. Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<u>Pada periode ini terdapat Kegiatan yang berjalan:</u> 1.1.1.1. Penyusunan/ Revisi RPHJP di 4 KPH 1.1.2.2. Patroli pengamanan hutan 1.1.2.4. Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura 1.1.2.5. Pembinaan MMP 1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL 1.2.2.1 Penanaman (P0) 1.2.2.4. Pengawasan Kegiatan RHL 2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS 2.1.2.2. Pengembangan Silvopastoral 3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan RE DD+ di Kalsel 3.1.1.6. Supporting sekretariat PokjaREDD+ 3.3.3.2. Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklim Provi nsi Kalimantan selatan
	4. **Dokumen persutujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Kalimantan Selatan dalam mendukung Implementasi Program** *(Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)* Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat. Periode 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan beberapa **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan. a) <u>SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penunjukan Pendamping Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)</u> PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN **DINAS KEHUTANAN** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN NOMOR /05/ TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN CADANGAN KARBON *RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2* PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor KEP-80/BPDLH/2025 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Dalam Rangka Implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II Melalui Lembaga Perantara telah menyetujui concept note 19 (sembilan belas) pemerintah daerah provinsi selaku penerima manfaat yang diajukan oleh lembaga perantara; b. bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.10054/ MENLHK PDASRH/SET.4/DAS.0/12/2022 tentang Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di wilayah Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditunjuk Petugas Pendamping RHL; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN CADANGAN KARBON *RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2* PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 DAFTAR NAMA PENUNJUKAN PENDAMPING KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN CADANGAN KARBON *RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2* PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NO | NAMA | WILAYAH KELOLA KPH | WILAYAH PENDAMPINGAN 1. Ahmad Rijal | KPH BALANGAN | Desa Banjang, Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara 2. Andarias Bayage | KPH HULU SUNGAI | Desa Limpasu Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah 3. Erwin Rifat Nazari | KPH KAYU TANGI | Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 4. Zaidan Sadad | KPH KAYU TANGI | Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 5. Muhammad Humaidi | KPH KAYU TANGI | Desa Baliangin Kec. Sambung Makmur Kab. Banjar 6. Afri Adiyatma PP | KPH PULAU LAUT SEBUKU | Desa Gunung Sari Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, FATHUL MUZZAHRA

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	SK ini menetapkan personel pendamping yang bertugas memberikan fasilitasi teknis, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RHL di tingkat tapak. Penunjukan pendamping tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses implementasi kegiatan oleh kelompok penerima manfaat berjalan sesuai dengan rencana kerja, standar teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program. b) <u>SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Penyusun Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)</u> PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN **DINAS KEHUTANAN** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN NOMOR [illegible] TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN CADANGAN KARBON *RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2* PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor KEP-80/BPDLH/2025 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Dalam Rangka Implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II Melalui Lembaga Perantara telah menyetujui *concept note* 19 (sembilan belas) pemerintah daerah provinsi selaku penerima manfaat yang diajukan oleh lembaga perantara; b. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlunya pembentukan tim penyusunan rancangan teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka peningkatan cadangan karbon *result based payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (Redd+) For Green Climate Fund (Gcf) Output 2* Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DALAM RANGKA PENINGKATAN CADANGAN KARBON RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDD+ FOR GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
---	---	---	---
1.	Fathimatuzzahra, S.Hut,MP	Penanggung Jawab Teknis	Kepala Dinas
2.	Ir. Alip Winarto, S.Hut,M.Si	Ketua Tim Teknis	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.	Muslim, S.Hut, M.Hut	Narahubung	Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4.	Althur Peber P.P, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
5.	Ali Masduq, S.Hut, M.Hut	Anggota	Staf Seksi Konservasi Tanah dan Air
6.	Budi Agung	Anggota	Staf Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7.	Antung Supian Rusali, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
8.	Isnan Ma'rief, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
9.	Riswan Muhammad, S.Kom	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
10.	Andy Sanjaya, S.Pd	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, FATHIMATUZZAHRA Surat Keputusan ini menetapkan pembentukan tim yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Rancangan Teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tim yang dibentuk terdiri dari unsur teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan teknis kegiatan RHL disusun secara sistematis, berbasis data dan kondisi tapak, serta mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku. Dokumen Rancangan Teknis yang dihasilkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk dalam penentuan lokasi, jenis tanaman, pola tanam, serta tahapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
	5. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program *(kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)* *Dokumen legalitas kelompok MMP dan MPA yang dilatih pada periode 2025, masih belum terkumpul. Dokumen legalitas ini akan di lengkapi pada pelaporan tahun 2026.*

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	6. Dokumen Persetujuan untuk Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Tapak *(peminjaman Aula, ketersediaan menghadiri undangan)*

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN JARO
KANTOR KEPALA DESA GARAGATA
Alamat : Jl. Ir. P.H. M. Noor Garagata RT. 03 Kecamatan Jaro

Tabalong,21 November 2025

Nomor : 414/KDG/PEM/005/11/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Undangan Pembinaan MMP

Kepada Yth.
Kepala KPH Tabalong
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala KPH Tabalong Nomor : 500.4.6.6/173/KPH-TABALONG/2025 tanggal 21 November 2025 Perihal : Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kesadaran dan tanggung jawab dalam membantu Polisi Kehutanan dalam Pengamanan Hutan, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa bersedia dan siap hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis s.d Sabtu, 27 s.d 29 November 2025
Waktu : 09.30 Wita - Selesai
Tempat : Objek Wisata Liang Tapah Desa Garagata Kec. Jaro

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA GARAGATA,
MIDRA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN MANTEWE
DESA EMIL BARU
Alamat : Jl. Lumpangi-Sebukin KM 91 RT.03 Dusun II Desa Emil Baru Kec.Mantewe Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan KP 72211 Email: Emilbaruuisd@gmail.com Telp.0831/5616133

Emil Baru, 23 Oktober 2025

Nomor : B/000.1.1/ 070 /SB/MPA-EMB/X/2025
Lampiran : -
Hal : Balasan Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api

Yth. Kepala KPH Kusan, Batulicin
Di_
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Nomor 500.4.6.6/464/KPH.KS Tanggal 22 Oktober 2025 Perihal Undangan Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, yang bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan, Kami dari MPA Emil Baru dengan ini menyampaikan bahwa kami bersedia dan siap hadir untuk mengikuti yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tgl : Selasa, 04 November 2025
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Kantor Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kepala Desa
BARRODIN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN PULAULAUT UTARA
DESA MEGASARI
Alamat: Jalan Bendungan RT.004/RW.002, Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos : 72114 Email: megasaridesa@gmail.com

Nomor : 230/MGS-2009/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Undangan Pembekalan dan Pembinaan MPA Yth. Kepada KPH Pulau Laut Sebuku

Kotabaru, 4 November 2025
Kepada :
di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.4.6.7/246/KPH-PLS/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan, kami dari MPA Macan Api dengan ini menyampaikan bahwa kami bersedia dan siap hadir untuk mengikuti yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Waktu : 09.30 Wita s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Desa Megasari
(ALI MUKDIN)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
Alamat : Jl. Sulawesi RT.002 RW.002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan 70723
e-mail : pem@kel-landasanulinutara.banjarbarukota.go.id
website : www.kel-landasanulinutara.banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 22 Oktober 2025

Nomor : 000/ 4o.I /SET/Kel. LAURA
Lampiran : –
Hal : Surat Izin Peminjaman Aula di Kelurahan Landasan Ulin Utara

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan
Di –
Tempat

Berdasarkan Surat permohonan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500.4.7.11/4094.HKPH-KAYU TANGI/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang peminjaman tempat untuk Pelaksanaan kegiatan RBP REDD + GCF output 2 Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan UPT tahura Sultan Adam yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal kamis, 23 Oktober 2025, maka dengan ini kami kantor kelurahan Landasan Ulin Utara memberikan izin peminjaman aula sebagai ruang acara.

Demikian surat balasan permohonan dari kami, semoga dapat dipergunakan sebagaimna mestinya. Besar harapan kami kepada panitia penyelenggara untuk dapat menjaga ketenaran dan ketertiban Lokasi.

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

LURAH LANDASAN ULIN UTARA
AULIA ARIEF DAYANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19911104 201001 1 009

Sebagai bagian dari pemenuhan aspek kepatuhan terhadap persetujuan pelaksanaan kegiatan serta dukungan pemangku kepentingan di tingkat tapak, 8 Pemerintah Desa yang dilibatkan telah menerbitkan surat resmi sebagai tanggapan atas undangan dari KPH terkait pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) maupun Kelompok Masyarat Peduli Api (MPA).

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Dokumen ini menjadi bukti adanya dukungan dan persetujuan dari pemerintah desa sebagai representasi masyarakat setempat terhadap pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, surat tersebut juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara pengelola program, unit pengelola hutan (KPH), serta pemerintah desa dalam memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan.
	7. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL **a)** <u>Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi</u> **LEMBAR PENGESAHAN** **RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) MENDUKUNG PROGRAM REDD+ PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025** Kelurahan : Cempaka Kecamatan : Cempaka Kota : Banjarbaru Provinsi : Kalimantan Selatan Luas : 100 Ha Nomor : 01/RANTEK/REDD+/2025 **DISAHKAN** Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan **Fathimatuzzahra, S.Hut, MP** NIP. 196805 19 199903 2 001 **DISUSUN** Kepala Bidang PDASRHL Dinas Kehutanan Provinsi Kaliamantan Selatan **Ir. Alip winarto, S.Hut, M,Si** NIP. 19700615 199803 1 013 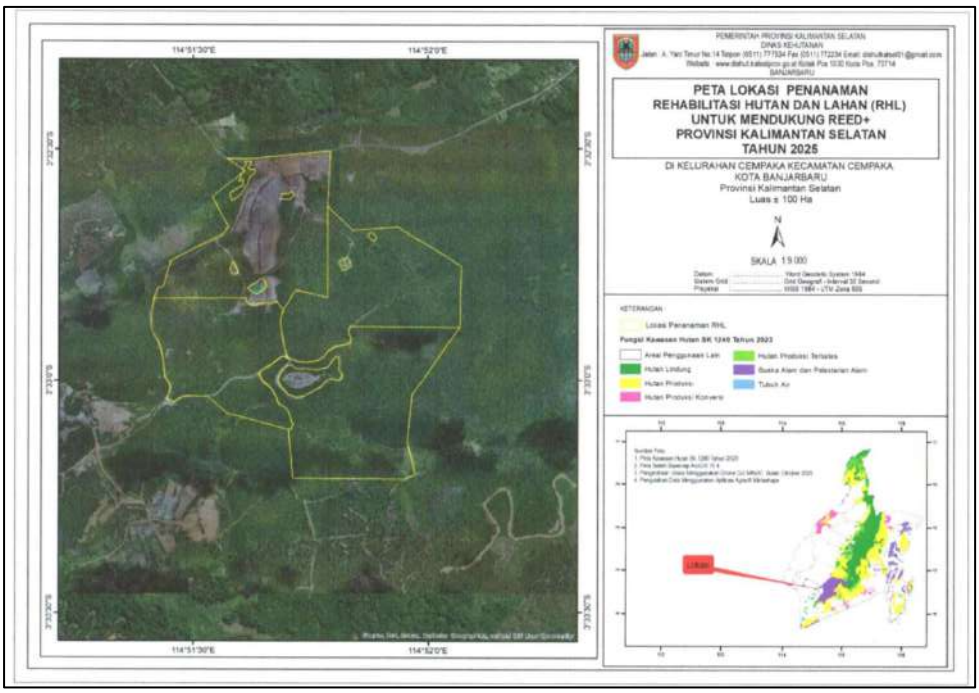 Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi penyusunan rancangan teknis RHL seluas 100 Ha di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru yangh masuk di wilayah kelola RHL Kayu Tangi.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Penyusunan rancangan teknis ini menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan direncanakan secara sistematis, berbasis kondisi tapak, serta mengacu pada standar teknis yang berlaku. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan
	8. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH Baik di Tingkat Nasional dan Provinsi Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan. Di provinsi Kalimantan Selatan, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.
ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	**1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan** SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan dan langkah mitigasi risiko.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai. Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.
	2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan Perlengkapan yang Berkaitan dengan K3. a) <u>Penggunaan alat pelindung diri (sepatu boot dan sarung tangan) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan</u>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	b) <u>Penggunaan alat pelindung diri (sepatu boot dan sarung tangan) dalam kegiatan patroli pengamanan dan kebakaran hutan dan lahan</u>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	    Kegiatan patroli memiliki risiko yang cukup besar, khususya kecelakaan kerja. Maka dari itu Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	3. Dokumentasi Kesetaraan Kesempatan dan Non-Diskriminasi *(ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) dan publikasi)* 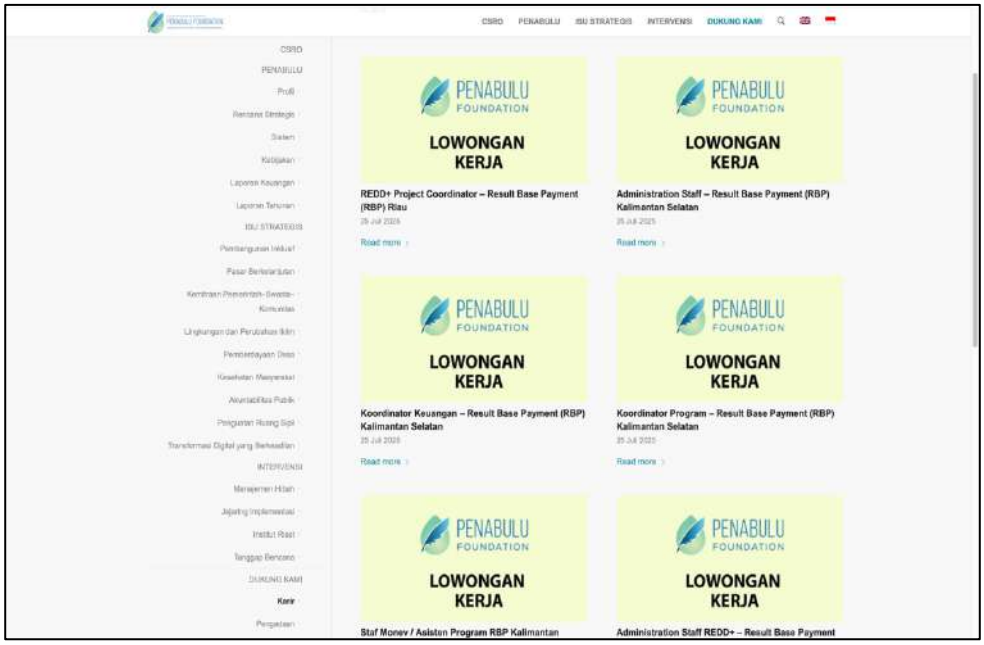 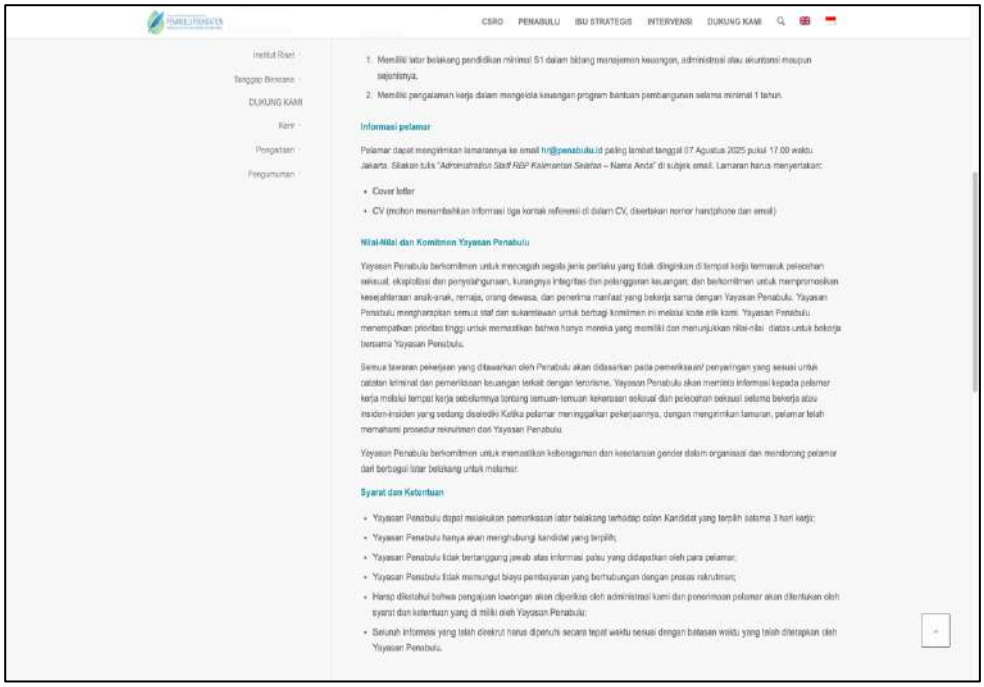 Penabulu secara konsisten menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, nondiskriminasi, dan inklusivitas dalam seluruh proses rekrutmen tenaga kerja, pengadaan jasa, dan pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Komitmen ini dituangkan secara eksplisit dalam setiap dokumen Terms of Reference (ToR)maupun dokumen pengadaan, dengan memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi terbuka bagi perempuan dan laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, gender, maupun kondisi sosial ekonomi.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Informasi kesempatan kerja juga dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Penabulu sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan akses yang setara bagi seluruh pelamar. Selain itu, Penabulu menegakkan standar GEDSI dan perlindungan safeguard dengan menetapkan kebijakan pencegahan terhadap pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pekerja anak, serta berbagai bentuk perilaku tidak etis di lingkungan kerja program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi juga disertai dengan pemeriksaan latar belakang, termasuk pengecekan catatan kriminal dan pemeriksaan terkait risiko pendanaan terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam lingkungan yang profesional, aman, dan dapat dipercaya. Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard dan non diskriminasi: *https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-selatan/*
	4. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Saluran dan Mekanisme Penanganan Keluhan Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	**1. Dokumentasi Manajemen Limbah Domestik yang Ditimbulkan Atas Pelaksanaan Kegiatan Bimtek, FGD, Workshop, Meeting dan Kegiatan Patroli, atau Limbah Lainnya Sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek.** Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Kalimantan Selatan Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya. Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.	-
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	-
ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	**1. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif**

Komplek Palapa, Jl. Palapa 2 No.4 , RT.11/RW.5,
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520
Telp/Fax: (021) 22783128
Email: info@gemilang-ut.co.id | Web: www.gemilang-ut.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 003/BA/PB-GCF02/XII/2025

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk kepertluan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 002/BA/PB-GCF02/XII/2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agustin A. Mustika
   Jabatan : Koordinator Program - Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pena Biru pada Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mamat Hikmat
   Jabatan : Direktur CV CIPUTRI

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV CIPUTRI selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk kepertluan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PO: PO-374532-251121-1 tanggal 21 November 2025.

Dengan rincian berupa :

No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Mangga	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 80 cm Bersertifikat dan label biru	7.821	Batang
2	Alpukat	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 70 cm Bersertifikat dan label biru	6.257	Batang
3	Matoa	Bibit Seedling Tinggi bibit ≥ 80 cm Non sertifikat	2.086	Batang
4	Nangka	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 80 cm Bersertifikat dan label biru	1.564	Batang
5	Cempedak	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 70 cm Non sertifikat	1.564	Batang

Komplek Palapa, Jl. Palapa 2 No.4 , RT.11/RW.5,
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520
Telp/Fax: (021) 22783128
Email: info@gemilang-ut.co.id | Web: www.gemilang-ut.co.id

No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
6	Kurnil	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 50 cm Non sertifikat	521	Batang
7	Manggis	Bibit Okulasi Tinggi bibit ≥ 50 cm Non sertifikat	1.043	Batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kalimantan Selatan, 2025

Pihak Pertama | Pihak Kedua

Agustin A. Mustika
Koordinator Program – Proyek *Result Based Payment* (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan

Mamat Hikmat
Direktur CV CIPUTRI

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip safeguard lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), proses pengadaan bibit tanaman dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi ekosistem setempat serta menghindari penggunaan spesies invasif. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan bibit untuk kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan, jenis bibit yang diadakan meliputi mangga, alpukat, matoa, nangka, dan cempedak. Jenis-jenis tanaman tersebut merupakan tanaman buah yang umum dibudidayakan oleh masyarakat serta bukan termasuk dalam kategori spesies invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem lokal.
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	-
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	**1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tigkat tapak.** Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi kegiatan periode tahun 2025: a) 1.2.1.1. Sosialisasi Penyusunan RKP RHL di KPH Kayu Tangi b) 3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel
	2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Daftar stakeholder rinci, disajikan di ***Lampiran 1.*** *Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program periode 2025*
	3. Publikasi Implementasi Program Daftar Publikasi rinci**,** disajikan di ***Lampiran 2.*** *Daftar publikasi program periode 2025*
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	-
ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	**1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan** Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	    Pada periode pelaksanaan 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 282 orang dibanding 992 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 28,43% dari total peserta.

Berikut rincian data pelibatan gender periode impelementasi tahun 2025:

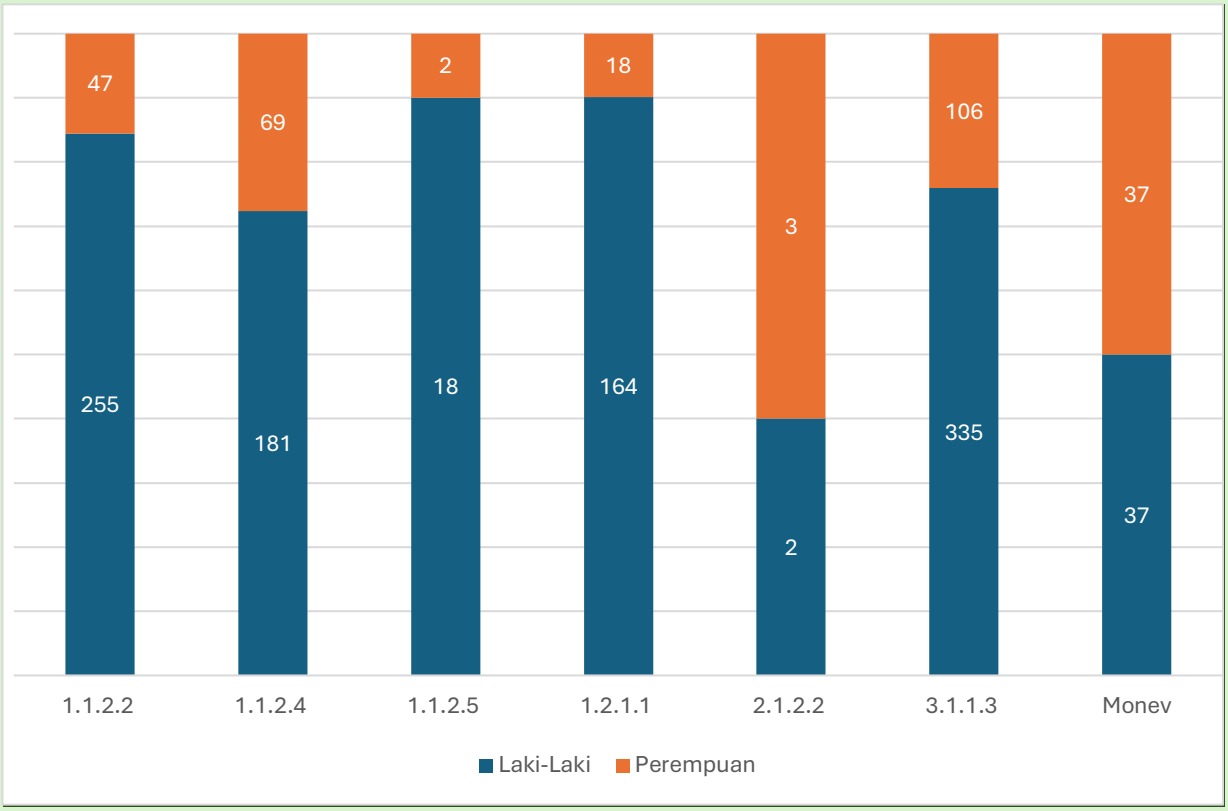

Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.2.2 Patroli pengamanan hutan	255	47	18,43%
1.1.2.4 Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura	181	69	38,12%
1.1.2.5 Pembinaan MMP	18	2	11,11%
1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL	164	18	10,98%
2.1.2.2 Pengembangan Silvopastora	2	3	150,00%
3.1.1.3 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel	335	106	31,64%
Monitoring-Evaluasi Program RBP REDD+ Kalse	37	37	50%
TOTAL	**992**	**282**	**28,43%**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program tahun 2025

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1 Penyusunan/Revisi RPHJP di 4 KPH	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
1.1.2.2 Patroli pengamanan hutan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatan patrolipengamanan hutan
1.1.2.4 Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatanpembekalan dan pembinaan
1.1.2.5 Pembinaan MMP	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	KPH Tabalong	sebagai pelaksana kegiatan
1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana penyusunan RKP RHL.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.2.2.1 Penanaman	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	KPH Kayu Tangi	Sebagai pelaksana kegiatan
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
1.2.2.4 Pengawasan Kegiatan RHL	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana pengawasan RHL.
2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatanpeningkatan kapasitas SDM
2.1.2.2 Pengembangan Silvopastoral	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	KPH Tanah Laut	Sebagai pelaksana kegiatan tingkattapak
	Kelompok Tani Hutan (KTH) 1.KTH Gunung Birah 2.KTH Bumi Priangan	Sebagai penerima manfaat
3.1.1.3 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Prov. Kalimantan Selatan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	Kementerian Kehutanan RI	Sebagai narasumber kegiatan
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi	Sebagai peserta kegiatan

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	
3.1.1.6 Supporting sekretariat Pokja REDD+	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara
3.3.3.2 Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklim Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	PT. Bitekra Pilar Pratama	Sebagai Vendor Pengadaan Barang
Monev Triwulan	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	Sebagai pelaksana monev
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.

Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Dishut Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7 November 2025	Instagram
Kalimantan Selatan	Video	Online	SOSIALISASI DAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PELAKSANAAN REDD+ PROV. KALSEL - DISHUT KALSEL	11 November 2025	https://youtu.be/gD6j2B5_hXs?si=JyRHF1kdZpyUQHfp
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Dishut Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	10 November 2025	https://dishut.kalselprov.go.id/2025/11/dishut-kalsel-gelar-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd-untuk-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-28887
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1976799248/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Kelola Hutan Berkelanjutan, Pemprov Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	7 November 2025	https://www.sonora.id/read/424316617/komitmen-kelola-hutan-berkelanjutan-pemprov-kalsel-gelar-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Mantapkan Langkah Menuju Hutan Lestari: REDD+ Jadi Senjata Lawan Krisis Iklim	6 November 2025	https://lenterakalimantan.net/news/kalsel-mantapkan-langkah-menuju-hutan-lestari-redd-jadi-senjata-lawan-krisis-iklim/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+, Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7 November 2025	https://redkal.com/berita/banjarmasin/sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd-komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan/

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel tegaskan komitmen pengendalian perubahan iklim melalui REDD+	6 November 2025	https://www.antaranews.com/berita/5225057/kalsel-tegaskan-komitmen-pengendalian-perubahan-iklim-melalui-redd-
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Melalui Penerapan REDD+	6 November 2025	https://klikkalsel.com/pemprov-kalsel-komitmen-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-penerapan-redd/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Dapat Dana REDD+ Rp3,4 Juta Dolar untuk Dukung Penurunan Emisi dan Rehabilitasi Hutan	7 November 2025	https://kalselmaju.com/2025/11/kalsel-dapat-dana-redd-rp34-juta-dolar-untuk-dukung-penurunan-emisi-dan-rehabilitasi-hutan/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	7 November 2025	https://dutatv.com/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Terima Dana REDD US$3,4 Juta Kalsel Rehabilitasi Hutan dan Tangani Karhutla	6 November 2025	https://mediaindonesia.com/nusantara/827955/terima-dana-redd-us34-juta-kalsel-rehabilitasi-hutan-dan-tangani-karhutla
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel bertekad kelola Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://www.wartaputrabalangan.com/2025/11/kalsel-bertekad-kelola-hutan.html
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Susah Payah Melindungi Hutan Kalsel, Paru Dunia yang Semakin Tersakiti	6 November 2025	https://esgnow.republika.co.id/berita/t5b9fp451/susah-payah-melindungi-hutan-kalsel-paru-dunia-yang-semakin-tersakiti-part5
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel Serius Jaga Hutan, Tancap Gas Wujudkan Pembangunan Hijau	7 November 2025	https://shalokalindonesia.com/pemprov-kalsel-serius-jaga-hutan-tancap-gas-wujudkan-pembangunan-hijau/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1976799248/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd?page=2
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Gubernur Kalsel Tekankan Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6 November 2025	https://www.jejakborneonews.com/gubernur-kalsel-tekankan-komitmen-pengelolaan-hutan-berkelanjutan/

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Susah Payah Melindungi Hutan Kalsel, Paru Dunia yang Semakin Tersakiti	7 November 2025	https://sorotkabar.com/detail/11382/susah-payah-melindungi-hutan-kalsel-paru-dunia-yang-semakin-tersakiti
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel mulai langkah rehabilitasi hutan lewat penanaman kembali	27 November 2025	https://www.antaranews.com/video/5271217/kalsel-mulai-langkah-rehabilitasi-hutan-lewat-penanaman-kembali
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Gunakan REDD+ Kalsel Tanam Pohon Buah Hingga Ulin	27 November 2025	https://rri.co.id/daerah/2003101/gunakan-redd-kalsel-tanam-pohon-buah-hingga-ulin
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Hijaukan Banua, Pemprov Kalsel Kick Off Program REDD+	27 November 2025	https://rri.co.id/daerah/2002803/hijaukan-banua-pemprov-kalsel-kick-off-program-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel pulihkan 250 hektare lahan kritis lewat Program RBP REDD+	27 November 2025	https://www.antaranews.com/berita/5271905/kalsel-pulihkan-250-hektare-lahan-kritis-lewat-program-rbp-redd-
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Program REDD+ di Kalsel Percepat Pengurangan Lahan Kritis	27 November 2025	https://matabanua.co.id/2025/11/27/program-redd-di-kalsel-percepat-pengurangan-lahan-kritis/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Kick Off Program RBP REDD+ 2025, Tanam 250 Hektar untuk Tekan Laju Deforestasi	27 November 2025	https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1340094/kalsel-kick-off-program-rbp-redd-2025-tanam-250-hektar-untuk-tekan-laju-deforestasi
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	REDD+ Suntik Rp50 Miliar Kalsel Sebut Pemulihan Lahan Kritis	27 November 2025	https://economictravelling.com/2025/11/27/redd-suntik-rp50-miliar-kalsel-kebut-pemulihan-lahan-kritis/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Didukung Pendanaan Internasional, Kalsel Mulai Penanaman Program REDD+	27 November 2025	https://kalimantanpost.com/2025/11/didukung-pendanaan-internasional-kalsel-mulai-penanaman-program-redd/#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Lahan Kritis di Kalsel Turun Signifikan, Rehabilitasi Hutan Beri Dampak Nyata	27 November 2025	https://bakabar.com/post/lahan-kritis-di-kalsel-turun-signifikan-rehabilitasi-hutan-beri-dampak-nyata-mih3lxfl#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Program REDD+ Dimulai dari Banjarbaru, Kalsel Fokus Pulihkan Lingkungan Dan Dongkrak Ekonomi Warga	27 November 2025	https://lenterakalimantan.net/news/program-redd-dimulai-di-banjarbaru-kalsel-fokus-pulihkan-lingkungan-dan-dongkrak-ekonomi-warga/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel terapkan program tanam RBE seluas 100 hektare di Cempaka	27 November 2025	https://kalsel.antaranews.com/berita/494393/pemprov-kalsel-terapkan-program-tanam-rbe-seluas-100-hektare-di-cempaka

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Terima Dana REDD US$3,4 Juta Kalsel Rehabilitasi Hutan dan Tangani Karhutla	27 November 2025	https://mediaindonesia.com/nusantara/827955/terima-dana-redd-us34-juta-kalsel-rehabilitasi-hutan-dan-tangani-karhutla#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kick Off Penanaman Program RBP REDD+ 2025 Digelar di Banjarbaru, Dorong Rehabilitasi 100 Hektare Lahan Kritis	27 November 2025	https://habarbanjar.com/2025/11/27/kick-off-penanaman-program-rbp-redd-2025-digelar-di-banjarbaru-dorong-rehabilitasi-100-hektare-lahan-kritis/